BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merujuk pada penelitian – penelitian sebelumnya. Berikut ini akandiurikan beberapa peneliti terdahulu bersama persamaan dan perbedaanya yang mendukung penelitian ini.

1. Muhammad Danu Setiyono Dan Rahardja (2012)

Meneliti adanya pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemn laba dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan.Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 – 2010 dengan menggunakan *Purposive sampling* dalam menentukan sampelnya.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Hasil penelitian menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dengan arah regresi negatif, artinya semakin meningkat manajemen laba, maka kinerja keuangan perusahaaan semakin rendah.

Persamaan:

1. Peneliti ini dengan peneliti terdahulu mempunyai kesamaan yaitu menggunakan corporate governance sebagai variabel independen
2. Populasi dan sampel menggunakan metode *Purposive sampling*

3. Menggunakan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BE

Perbedaan :

1. Peneliti terdahulu menggunakan manajemen laba dan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen, sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen.
2. Peneliti terdahulu menggunakan metode analisis regresi, sedangakan peneliti sekarang menggunakan regresi linier berganda.
3. Penelitian ini menggunkan tahun 2008 – 2012, sedangkan peneliti terdahulu menggunkan tahun 2008 – 2012.

2. Sri Wijayanti dan Siti Mutmainah (2012)

Menganalisis adanya pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI) tahun 2009 – 2011. Peneliti ini menguji pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan dengan menggunkan tiga indikator yaitu kepemilikan institusioanal, dewan direksi, dan dewan komisaris.Peneliti menggunakan seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan indikator kepemilikan institusional, dewan direksi dan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan perbankan.

Persamaan :

Peneliti ini dan peneliti yang akan diuji sekarang memiliki kesamaan dalam mengukur kinerja keuangan yaitu dengan menggunkan indikator CFRO (Cash Flow Return On Asset) , selain itu ada kesamaan dalam menggunakan metode penelitian yaitu dengan menggunakan metode purposive sampling

Perbedaan :

1. Penelitian terdahulu menggunakan seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 -2011, sedangkan peneliti sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2008 – 2012.
2. Penelitian terdahulu menggunakan *Good Corporate Governance* dengan indiaktor kepemilikan institusional, dewan direksi dan dewan komisaris, sedangkan peneliti sekarang menggunakan dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit.

3. Serlie Ike susanti (2011)

Menganalisis adanya pengaruh kualitas *corporate governance*, kualitas audit, dan *earnings management* terhadap kinerja perusahaan.Peneliti ini menguji pengaruh kualitas *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.Kualitas *corporate governance*diaproksikan dengan menggunkan empat indikator yaitu kepemilikan institusi domestik, komisaris independen, komite audit, dan dewan komisaris.Peneliti menggunakan seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa efek Jakarta tahun 2003 – 2006. Teknik analisis yang digunakan analisis *multiple regression*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proporsi kepemilikan

institusi domestik , komisaris independen, komite audit dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas kinerja perusahaan, sedangkan komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Serlie Ike Susanti adalah:

1. Menguji Kualitas *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan
2. Populasi dalam pengambilan sampel sama – sama menggunkan seluruh perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda (*multiple linier regression*)

Perbedaan :

Pada penelitian ini variabel independen menggunakan *earning managemet* dan Indikator *Good Corporate governance* menggunakan kepemilikan institusi domestik, Komisaris independen, komite audit, dewan komisaris.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Topic /Jurnal	Variabel	Hasil
Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap manajemen laba dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan	Variabel Independen*: Good corporate Governance* Variabel dependen:Manajemen laba dan kinerja perusahaan	Bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dengan arah regresi negative artinya semakin meningkat manajemen laba, maka kinerja keuangan perusahaan semakin rendah
Penerapan *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011	Variabel Independen:*Good Corporate Governance* Variabel dependen : Kinerja keuangan perusahaan	Bahwa kepemilikan institusional, dewan direksi dan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Pengaruh kualitas *corporate governance*, kualitas audit dan earnings management terhadap kinerja perusahaan	Variabel independen: *Good corporate governance*,Kualitas audit dan *earnings management* Variabel dependen: Kinerja Perusahaan.	Bahwa Kepemilikan institusi domestic berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan,Komite audit berpengaruh secara negative terhadap kinerja perusahaan ,sedangkan earning management berpengaruh secara negatif terhadap kinerja perusahaan

2.1 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory

Corporate Governance meruapakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan yang diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada para investor, bahwa investor akan menerima return atas dana yang telah diinvestasikan. Ismail (2008:119)*Agency theory* memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai

agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri (*self –interest*) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship theory*.

Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dan *agent*.*Principal* yang tidak mampu mengelola perusahaanya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaanya kepada agent sesuai dengan kontrak kerja.Pihak manajemen sebagai *agent* bertanggung jawab secara moral dan professional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Sebagai imbalanya, manajer sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Sementara pihak *principal* melakukan kontrol terhadap kinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik, dengan tujuan modal yang telah ditanamkan berkembang dengan optimal

Arifin, (2005) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi yaitu: (1) asumsi tentang sifat manusia (*human assumptions*), (2) asumsi tentang keorganisasian(*organizational assumptions*), dan (3) asumsi tentang informasi (*Information assumptions*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) *self –interest*, yaitu sifat manusia yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, (2)*bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, (3) *risk aversion* yaitu sifat manusia yang cenderung memilih menghindari resiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : (1) konflik sebagai tujuan antar partisipan, (2) efisiensi

sebagai suatu kriteria efektivitas, dan (3) asimetri informasi antara *principal* dan *agen.*

Asimetri antara manajemen dengan pemilik memberikan kesempatan kepada manajer untuk berlaku opportunis untuk memperoleh keuntungan pribadi. Disinilah terjadi konflik antara *agen* dan *principal* karena manajer lebih cenderung mementingkan kepentingan dirinya sendiri misalnya manajer mengalokasikan investasi untuk kepentingan proyek – proyek lain yang dapat menurunkan nilai perusahaan karena manajer tidak membagikan *retrun* saham kepada investor .Maka penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kualitas laba yang baik karena kualitas laba yang baik diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga terjadi independensi yang baik bagi para manajer dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang maksimal dan *retrun* yang memadai bagi para pemegang saham.

2.2.2 *Corporate Governance*

Istilah "*corporate governance*" (tata kelola perusahaan) berasal dari suatu analogi antara pemerintahan suatu negara atau kota dengan pemerintahan dalam suatu perusahaan (Becht et al., 2002) dalam Ismail (2008) .Sebagaimana halnya pemerintahan negara yang melibatkan berbagai kelompok dengan berbagai kepentingan berbeda untuk mencapai suatu tujuan, *corporate governance* juga berkaitan dengan penyelarasan masalah tindakan kolektif yang melibatkan berbagai investor.*Corporate governance* juga menyangkut rekonsiliasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda dari para pemangku kepentingan. Hal tersebut

berarti bahwa tanpa adanya *corporate governance* yang baik akan terjadi konflik kepentingan yang bisa memberi dampak buruk bagi kinerja perusahaan.

OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development)* mendefinisikan *Corporate governance* merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur *corporate governance* menetapkan distribusai hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi seperti dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainya). Menurut pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup lima tugas utama yaitu:

1. Kepengurusan, mencakup tugas penyususnan visi dan misi perusahaan serta penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang
2. Manajemen risiko, mencakup tugas penyususnan dan pelaksanaa sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.
3. Pengendalian internal, mencakup penyususnan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal peruasahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
4. Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.

5. Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab social perusahaan.

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan *good corporate governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah – kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber – sumber perusahaan untuk berfungsi secara efesien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Lembaga *corporate governance* di Malaysia , yaitu *Finance Committe on Corporate Governance* (FCGG), mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan stuktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Ismail (2008:117) menjelaskan alasan- alasan yang mendorong pentingnya isu *Good Corporate Governance* adalah:

1. Munculnya gelombang privatisasi diseluruh dunia

   Privatisasi menjadi fenomena yang sangat penting dan terjadi di Negara – negara Amerika Latin, Eropa Barat.Dan sebagian besar di Negara –negara bekas Uni Soviet.Aktivitas privatisasi ini telah memunculkan persoalan mengenei bagaimana perusahaan – perusahaan yang baru di privatisasi tersebut dimiliki dan dikendalikan.Fenomena ini juga menimbulkan subjek penelitian baru mengenei bagaimana seharusnya peran pemerintah sebagai salah satu

pemegang saham didalam perusahaan yang baru diprivatisasi tersebut merupakan badan usaha yang dimiliki pemerintah.

2. Reformasi dan Pensiun

   Reformasi dan pension yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa Negara yang tergabung dalam OECD (termasuk Jepang) telah mengakibatkan semakin besarnya dana yang disalurkan lewat organisasi dana yang disalurkan lewat organisasi dana pension (*pension Fund*). Hal ini mengakibatkan meningkatnya investasi yang dilakukan oleh investor kelembagaan.

3. Merger dan pengambilalihan perusahaan (*takeovers*)

   Pada dasarnya masalah *corporate governance* akan mulai mengemuka pada saat investor luar berkeinginan untuk memegang kendali dari para manajer yang saat ini telah bercokol sebagai pengelola perusahaan. Oleh sebab itu, berbagi kegiatan pengambilalihan yang tidak bersahabat (*hostile takeover)* yang terjadi di Amerika dan Eropa, juga berbagai Negara lainya, telah meningkatkan perhatian terhadap penerapan *good corporate governance* di berbagai perusahaan di dunia.

4. Deregulasi dan integrasi pasar modal

   Aturan *Corporate Governance* telah di promosikan sebagai bagian acara untuk mrlindungi dan merangsang investasi luar negeri terutama untuk Negara – negara Eropa Timur, dan berbagai Negara lainya yang saat ini telah muncul sebagai kekuatan pasar dunia (*Earnings Markets*) seperti Brazil, Rusia, India, dan Cina. Selain itu, pasar modal dunia yang semakin terintregasi telah turut mempercepat perpindahan capital dari suatu tempat ke tempat lain. Keadaan

tersebut turut meningkatkan munculnya penerapan *Good Corporate Governance* di Negara-negara yang menjadi target investasi asing.

5. Krisis Ekonomi Asia Timur, Rusia, dan Brazil

   Krisis di Asia Timur telah menguak tabir lemahnya perlindungan terhadap investasi yang dilakukan oleh investor asing di wilayah ini.Kerugian yang diderita para investor sebagian besar diakibatkan oleh praktik *Corporate Governance* yang tidak sehat sehingga gagal untuk menyelamatkan kekayaan investor. Kejadian yang sama pula menimpa para investor yang berinvestasi di Rusia dan Brazil. Semua kejadian tersebut turut meningkatkan kebutuhan para investor akan praktik *Good Corporate Governance.*

6. Berbagai skandal yang menimpa perusahaan besar.

   Berbagai skandal terjadi di perusahaan-perusahaan besar dengan reputasi baik seperti Enron.Ketika pada akhirnya perusahaan terbukti melakukan berbagai manipulasi akuntansi yang melibatkan eksekutif puncak perusahaan, hal tersebut mengakibatkan harga saham turun dari kisaran delapan puluh dolar lebih per lembar saham turun dari kisaran delapan pulh dolar lebih per lembar saham menjadi hanya sebesar satu dolar per lembar selama tahun 2001. Penurunan harga saham ini tidak akan merugikan para investor yang membeli saham perusahaan berdasarkan informasi keuangan yang keliru, melainkan penurunan harga saham ini juga telah mengakibatkan karugian bagi para karyawan yang memiliki saham perusahaan sebagai cadangan bagi dana pension mereka.

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, GCG memiliki prinsip sebagai berikut: (Solihin, 2009 : 125).

1) Transparansi *(transparency)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Akuntabilitas *(accountability)*

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparandan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuaidengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentinganpemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Responsibilitas*(responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuansebagai *good corporate governance.*

4) Independensi *(independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain

2.2.3 Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan.Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Artinya, jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Hardikasari (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyak penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang lebih kecil..Namun demikian, Dalton *et al*. (dalam Hardikasari, 2011) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan kinerja perusahaan.Hal tersebut menggambarkan bahwa ukuran dewan direksi

merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance* yang penting dalam menentukan kinerja perusahaan.

2.2.4 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan.Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu, posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan.Hardikasari (2011) menyebutkan bahwa penelitian mengenai ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Dalam penelitiannya tersebut, disebutkan argumen dari Yermack (1996) dalam IqbalBukhori (2012) yang menyatakan bahwa semakin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan.

2.2.5 Komite Audit

Komite audit adalah sebagai pihak independen yang mengontrol sistem pengendalian perusahaan agar baik dan memastikan laporan keuangan yang dibuat manajemen perusahaan agar baik dan memastikan laporan keuangan yang dibuat manajemen perusahaan tidak menyesatkan dalam memberikan informasi manjemen. Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* (GCG) karena merupakan "mata"dan "telinga dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalanya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG.Kehadiran komite audit di perusahaan publik telah mendapat respons yang cukup positif dari berbagai pihak, antara lain pemerintah Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, para investor, profesi penasihat hukum (advokat), profesi akuntan, serta perusahaan penilaian independen

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan – perusahaan. Bapepam melalui surat Edaran No. 03/PM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan public mewajibkan dibentuknya komite audit.

Pengaturan menegenei jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan publik diatur dalam perturan Bapepam – LK No.IX.I5 tentang pembentukan

pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan publik diwajibkan membentuk komite audit yang berjumlah sekurang – kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan komisaris independen perusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit.

2.2.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manjerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris (Pujiati dan Widanar 2009). Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan saham oleh manajer dan pemegang saham karena dengan memiliki saham perusahaan, manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer juga akan menaggung kerugian sebagai salah satu konsekuensi kepemilikan saham. Dengan adanya kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainya sehingga permasalahan antara *agent* dan *principal* diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham (Ujiyanto,2010).

2.2.7 Kinerja Perusahaan

Pengukuran kinerja adalah suatu proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang strategis, mengeliminasi pemborosan – pemborosan dan menyajikan informasi yang tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan. Adapun

pengukuran didalam kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dalam mematuhi standar perilaku yang telah diterapkan sebelumnya , agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan (Mulyadi , 2001 : 415 – 416).

Menurut Hastuti (2005) : kinerja perusahaan adalah hasil banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen, karena itu menilai kinerja suatu perusahaan perlu melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkanya dengan menggunakan ukuran komparatif.

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkosentrasi atau tidaknya terkosentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan. Kepemilikan yang banyak terkosentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Pengertian kinerja keuangan menurut Stoner (1996:6) adalah “ukuran seberapa efesiensi dan efektif seorang manajer atau sebuah perusahaan, seberapa baik manajer atau perusahaan tersebut mencapai tujuan yang memadai”. Dengan kata lain kinerja (*performance*) adalah hasil dari banyak keputusan yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif.

Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan.Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode

tertentu adalah laporan laba rugi.Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan disclousure laporan keuangan. *Disclousure* sebagai salah satu aspek *good corporate governance* diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini kinerja yang digunakan adalah CFROA (*cash flow retutn on asset*).

Cash Flow Return On Asset (CFROA) merupakan ratio keuangan lain yang digunakan dalam pengukuran kinerja perusahaan. CFROA menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan saham (Sekaredi, 2011).CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva.

$$\text{CFROA} = \frac{\text{EBIT + DEP}}{\text{ASSET}}$$

2.2.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Weston yang dikutip dari Mar'ati dan Purnomo (2011) mengatakan dalam pemilihan cara pembiayaan, perusahaan besar yang sahamnya dimiliki oleh banyak orang akan mempengaruhi pengendalian perusahaan. pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar *(large firm),* perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*)**.** Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting

dalam proses pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat seberapa besar *asset* yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.Aset yang dimiliki perusahaan ini menggambarkan hak & kewajiban serta permodalan perusahaan. Darmawati (2004) menyatakan bahwa perusahaan besar pada dasarnya memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi disisilain, perusahaan dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih besar.Hesti (2010) dan Uyun (2010) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.2.9 Hubungan Antara Ukuran Dewan Direksi dengan KinerjaPerusahaan

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang (Bodroastuti, 2009).Dewan direksi merupakan pusat pengendalian di dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang. Dewan direksi merupakan faktor penentu terbentuknya kebijakan yang akan diambil perusahaan, selain itu Dewan Direksi juga yang menentukan strategi apa yang akan diambil perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Faisal (2005) bahwa peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya. Teori ini didukung oleh hasil penelitian Hapsoro (2008) serta Maryanah dan Amilin (2011) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Hasil penelitian Gil dan Obradovich (2012) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jumlah dewan direksi yang lebih sedikit akan menciptakan komunikasi yang lebih baik diantara para direktur, koordinasi yang lebih efektif, dan tindakan yang lebih ceoat dalam mengatasi masalah.

2.2.10 Hubungan Antara Ukuran Dewan Komisaris dengan Kinerja Perusahaan

Komita Nasional Kebijkan *Governance* (KNKG, 2006) mendefinisikan Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepeda Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam implementasi *corporate governance*, karena Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategis perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan dewan direksi. Peran Dewan Komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahn agensi yang timbul antara Dewan Direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu Dewan Komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja Dewan Direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris mengadakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk

membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.Menurut Juwitasari (2008) semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka akses semakin baik yang berdampak pada kinerja perusahaan yang lebih baik.Rapat dewan komisaris merupakan salah satu sumber informasi yang diungkapkan melalui rapat tersebut meliputi tidak hanya pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, pengendalian internal tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.

Hasil penelitian Wulandari (2006), Darwis (2009) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.MenururDarwis (2009) keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi saja sehingga keberadaan dewan komisaris ini tidak menjalankan monitoring yang baik dan tidak menggunakan independensinya untuk mengawasi kebijakan direksi.

2.2.11 Hubungan Antara Komite Audit dengan Kinerja Perusahaan

Fungsi komite audit adalah menjebatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajeman serta auditor internal dan eksternal. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah komite audit. Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik terhdap kinerja keuangan perusahaan (Anderson et a., 2004). Hal ini sesuai dengan penelitian Hapsoro (2008) serta Gil dan Obradovich

(2012) yang menyatakan terdapat hubungan positif antara komite audit dengan kinerja keuangan perusahaan.

Romano et al. (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara jumlah komite audit dengan kinerja keuangan perusahaan, serta dengan jumlah komite audit yang lebih sedikit, pengendalian internal akan menjadi lebih baik, meningkatkan kewaspadaan atas kegiatan dan keputusan dewan yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

2.2.12 Hubungan Antara Kepemilikan Manajerial dengan Kinerja Perusahaan

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan yaitu direksi, dan komisaris (Pujiati dan Widanar 2009).Jensen dan Meckling (1976) membuktikan bahwa kepemilikan saham oleh manajer dapat mensejajarkan kepentingan anatara manajer dan pemagang saham.

Bathala et al. (1994) menyimpulkan bahwa level kepemilikan manjerial yang lebih tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Hal tersebut didasarkan pada logika bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki manjerakan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan mengkonsumsi yang berlebihan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gil dan Obradovich (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.2.13 Hubungan antara corporate governance terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel kontrol digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh terhadap variabel bebas dan menguji apakah ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah variabel *corporate governance*. Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menggambarkan besar kecilnya suatu peusahaan yang dapat dinilai dari total aktiva perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar akan menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik. Perusahaan dengan pertumbuhan yang besar akan memperoleh kemudahan untuk berinvestasi di pasar modal dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan yang menandakan kinerja perusahaanpun juga semakin membaik. Nilai perusahaan yang meningkat dapat ditandai dengan adanya total aktiva perusahaan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang perushaan. Darmawati (2004) menyatakan bahwa perusahaan besar pada dasarnya memiliki kekuatan *financial* yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi disisi lain perusahaan dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih besar. Hesti (2010) dalam penelitianya menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.2.14 Hubungan Antara Agency Theory dengan Kinerja Perusahaan

Agency theory menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*Principal*/ pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agent/direksi/manajeman). *Agency theory* memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan principal dan agen. Selain itu *agency theory* timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikannya mendapatkan return maksimal, sedangkan manajer berkepentingan terhadap pengelolaan dana pemilik. Dengan adanya *agency theory* maka pemisahan fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan yang disyaratkan pada *agency theory* memungkinkan terciptanya cheks and balances dalam korporasi sehingga terjadi independensi yang sehat bagi para manajer untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang maksimal dan pengambilan (*return*) yang memadai bagi para pemegang saham

2.3 Kerangka Pemikiran

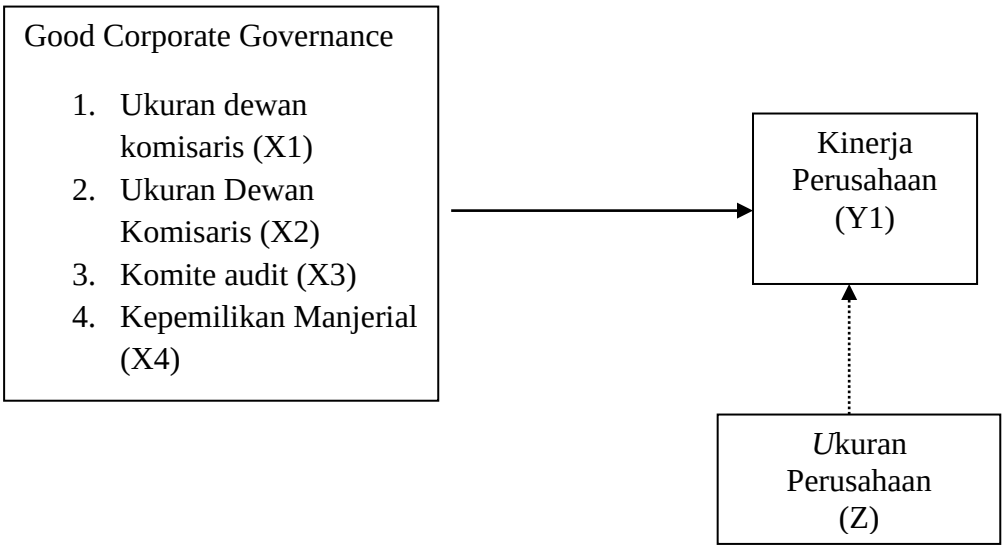

Gambar : 2.1

Kerangka Pemikiran

Good Corporate Governance dengan indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan manajerial. Jika ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik maka akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengambilan keputusan yang lebih baik serta bisa meningkatkan efesiensi operasional perusahaan dengan lebih baik . Dengan kata lain jika suatu manajemen perusahaan malaksanakan praktek *Good Corporate Governance* dengan baik maka akan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat mempengaruhi kinerja perusahaan dilihat dari seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan, maka semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan kinerja perusahaan.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI 2008– 2012

H2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI 2008– 2012

H3 : Komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI 2008– 2012

H4 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI 2008-2012

H5 : Ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.